

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Iklim Usaha

Iklim usaha adalah strategi perkembangan usaha untuk menentukan keberhasilan investasi pada suatu proses jangka panjang bukan hanya pada rencana awal investasi tetapi sepanjang perusahaan itu berjalan (KPPOD, 2015) Menurut para ahli, iklim usaha adalah pengembangan bagi para investor untuk melakukan investasi. Maka dari itu peran pemerintah sangat penting dalam setiap proses yang dijalankan para pengusaha seperti proses penanaman modal. Selain itu rekomendasi dari pemerintah juga dinyatakan syarat yang mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Dengan itu berkaitan pula dalam masalah pemanfaatan tata ruang, gangguan lingkungan dan ketertiban umum.

Suatu kondisi iklim usaha yang ideal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan dari usaha-usaha mikro ke multinasional atau perusahaan swasta untuk berkembang dan melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan berkembang. Oleh karenanya, iklim usaha yang baik memainkan suatu peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Lestari dan Hidayat, 2014)

Iklim usaha adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk

melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Kebijakan dan perilaku pemerintah memiliki suatu pengaruh yang besar melalui dampaknya terhadap biaya, risiko, dan pembatasan bagi persaingan (KPPOD, 2015).

Iklim usaha merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitannya tersebut, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Hal tersebut terkait pula dengan masalah pemanfaatan tata ruang, gangguan lingkungan dan ketertiban umum

a. Faktor Yang Mempengaruhi Iklim Usaha

Menurut Lestari dan Hidayat, (2014) faktor yang mempengaruhi iklim usaha di suatu daerah yaitu stabilitas sosial dan politik, kondisi infrastruktur, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi konsistensi dan kepastian kebijakan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut menurut hasil *World Economics Forum* mengemukakan bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi iklim usaha disuatu daerah adalah stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi dan kepastian kebijakan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang menghambat bisnis yaitu birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan. *World Economics Forum* mengklasifikan faktor-faktor yang berpengaruh pada iklim usaha dari yang terkecil hingga terbesar pengaruhnya yaitu dari inflasi, etika

kinerja yang buruk, pemerintah yang tidak stabil, kriminalitas, regulasi valas, akses keuangan, tarif pajak, regulasi tenaga kerja restriktif, kebijakan tidak stabil, kualitas sumber daya manusia buruk, korupsi, regulais perpajakan, infrastruktur yang buruk dan terakhir birokrasi yang tidak efisien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi iklim usaha daerah sebagai berikut :

1) Investasi

Investasi adalah suatu penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru berupa barang atau benda. Dengan adanya investasi maka perusahaan akan mempunyai modal yang akan digunakan untuk biaya operasional. Modal tersebut dapat digunakan untuk keperluan investasi seperti membeli peralatan, bangunan dan persediaan. Fungsi dan pengaruh investasi sangat berlipat ganda. Faktor yang mempengaruhi investasi sebagai berikut :

a) Suku Bunga

Suku bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Suatu rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabung akan diperoleh. Pada suku bunga rendah orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi atau berinvestasi dari pada menabung.

b) Tingkat Inflasi

Inflasi adalah tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari barang-barang lainnya. Dalam perekonomian besarnya tingkat inflasi di bawah 10% per tahun, inflasi ini tergolong inflasi ringan. Besarnya tingkat berkisar antara 10 sampai 30 persen per tahun dikategorikan inflasi sedang. Dan apabila tingkat inflasi berada dikisaran 30 sampai 100 persen per tahun dikategorikan inflasi berat. Dalam kisaran tertentu inflasi juga dapat mencapai ratusan bahkan ribuan persen per tahun, sebagai akibat dari resesi ekonomi maupun sebab-sebab lain, inflasi ini tergolong dalam hiperinflasi.

c) Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Maka dari itu kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu proses produksi. Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Selain itu sumber daya manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan

tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

d) Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang satu negara terhadap harga mata uang negara lain. Nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari sebuah Negara yang diukur dan dinyatakan dengan mata uang lain. Nilai tukar mata uang dapat didefinisikan sebagai harga relatif dari mata uang terhadap mata uang Negara lainnya.

2) Pemerintah

Pemerintah adalah sebagai peran pengelola bisnis yang ada. Melalui kebijakan fiskal atau moneter pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan bisnis . jika pemerintah menerima lebih kecil dari apa yang dipinjam maka pemerintah mengalami defisit. Apabila pemerintah mengalami defisit dapat menimbulkan inflasi.

3) Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi pasar juga membutuhkan daya beli, perusahaan perlu menyadari bahwa pendapatan saat itu, tabungan dan kredit yang tersedia merupakan dalam lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi dapat mempengaruhi bisnis perusahaan diantara tingkat pendapatan perkapita, kebijakan fiskal, moneter, perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, pergerakan modal, pergerakan investasi dan perubahan persaingan.

4) Lingkungan Teknologi

Pada era sekarang ini keunggulan teknologi sangat berperan penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Dimana perusahaan dapat menciptakan produk yang baik dengan dukungan kompetensi teknologi akan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Teknologi yang baru dapat dikatakan sebagai kekuatan penghancuran kreatif, untuk industri tua tidak bergerak menuju sesuatu yang baru dan menolaknya sehingga mengakibatkan industri mereka merosot kalah saing dengan industri yang sudah mempunyai teknologi baru. Sikap seseorang terhadap teknologi tergantung pada seseorang terpicat pada dampak positifnya atau negatifnya.

5) Faktor Kondisi Negara

Suatu kondisi negara yang tidak menentu dapat menghambat bisnis yang dijalani. Kondisi negara seperti sosial politik, kondisi perekonomian, pertahanan dan keamanan negara. Seperti contoh apabila negara sedang mengalami inflasi atau banyak masyarakat yang berdemonstrasi maka itu akan mempengaruhi bisnis yang dijalani .

6) Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan agen terpenting dalam suksesnya produk yang dihasilkan agar diterima oleh konsumen. Bisnis yang sukses membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, berkualitas tinggi, ulet, inovasi, pantang menyerah, mampu bersaing dan pandai mengolah bisnisnya.

7) Faktor Lingkungan Politik dan Hukum

Lingkungan politik dan hukum sangat mempengaruhi keputusan keputusan perusahaan untuk membuat kebijakan bisnis. Adapun lembaga, pemerintahan, dan kelompok penentang yang membatasi gerak-gerik organisasi dan individu dalam masyarakat akan memberikan ancaman bisnis disuatu negara seperti siapa yang berkuasa di negara, bagaimana menjalankan roda pemerintahan, serta peran yang dimiliki oleh pelaku-pelaku dalam percampuran politik suatu negara. Hal itu akan berdampak pada penciptaan profit oleh pelaku usaha dan bagaimana distribusi pendapatan yang ada.

Masyarakat sekarang ini berada pada masa transisi dimana masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Dalam masyarakat Indonesia hubungan kekerabatan merupakan peran yang penting. Pada saat perusahaan melakukan penarikan tenaga kerja seringkali keunggulan individu bukan satu-satunya syarat yang dihandalkan. Praktek nepotisme, koneksi dan pencaloan tenaga kerja menjadi budaya masyarakat. Meskipun itu sulit untuk diubahnya tetapi apabila tetap menjadi sebuah adat tradisonal akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha dan akan mengurangi daya saing industri.

b. Iklim Usaha di Daerah

Perkembangan ekonomi daerah banyak digerakan oleh konsumsi domestik, maka dari itu perlu di dorong oleh investasi dan ekspor sehingga diperlukan iklim usaha yang kondusif. Pada iklim usaha yang

kondusif dalam iklim yang mendorong seorang untuk melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Faktor yang berpengaruh dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif yaitu stabilitas sosial dan politik, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsisten dan kepastian kebijakan (Haryotejo, B., 2012)

Potensi investasi di daerah adalah objek yang ditawarkan untuk melakukan kerjasama dalam investasi bagi daerah. Masing-masing daerah harus memiliki objek investasi.

Untuk menjamin pengembangan iklim usaha dan investasi, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan minimalisir berbagai hambatan yang terjadi. Meskipun demikian, rendahnya kinerja investasi masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prosedur perijinan yang terkait dengan investasi yang panjang, dimana prosedur perijinan untuk memulai usaha di Indonesia termasuk sangat lama di Asia yang mencakup 12 prosedur dengan waktu sekitar 151 hari, sedangkan prosedur perijinan investasi di RRC, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam berturut-turut hanya membutuhkan sekitar 40 hari, 20 hari, 30 hari, 50 hari, 8 hari, 33 hari, dan 56 hari.

- 2) Rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah dan antar sektor serta belum diundangkannya RUU Penanaman Modal guna lebih menjamin kepastian hukum di bidang investasi.
- 3) Belum menariknya insentif bagi kegiatan investasi, dimana jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk tertinggal di dalam menyusun insentif investasi.
- 4) Rendahnya kualitas infrastruktur yang sebagian besar dalam keadaan rusak akibat krisis (KPPOD, 2015).

2. Pengertian Industri

a. Konsep dan Definisi

Industri mempunyai dua pengertian, pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas, “Industri yaitu mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi bersifat produktif”. Sedangkan pengertian secara sempit:

Industri adalah hanya mencakup industri pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, kemudian barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir.

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis,

kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan.

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

b. Pengelompokan Jenis Industri

Departemen Perindustrian mengelompokan Industri Nasional Indonesia dalam 3 kelompok besar yaitu:

1) Industri Dasar

Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar dan kelompok industri kimia dasar. Yang termasuk dalam logam dasar antara lain industri mesin

pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, alumunium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk kimia dasar adalah industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat dan sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja secara besar.

2) Aneka Industri

Yang termasuk dalam aneka industri adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain. Aneka industri mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.

3) Industri Kecil

Industri kecil meliputi industri pangan seperti makanan, minuman dan tembakau, industri sandang dan kulit seperti tekstil, pakaian jadi serta barang dari kulit, industri kimia dan bahan bangunan seperti industri kertas, percetakan, penebitan,

barang-barang karet dan plastik, industri kerajinan umum seperti industri kayu, rotan, bambu dan barang galian bukan logam dan industri logam seperti mesin, listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya.

c. Definisi Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan kegiatan dalam suatu wilayah, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha bisa dikatakan sebagai produsen yaitu sebagai pembuat produk jadi, menghasilkan bahan baku, membuat suku cadang, menjadikan produsen dengan jalan mencampurkan namanya, dan bentuk distribusi dalam perdagangan. Yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pelaku usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Investor adalah pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai segala keperluan bisnis.
- 2) Produsen adalah pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lain.

3) Distributor adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa kepada masyarakat luas.

Hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yaitu :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
- 4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi iklim investasi, kebijakan pemerintah yang kondusif akan berdampak pada iklim investasi yang baik. Iklim usaha menjadi kunci awal pembangunan daya saing industri nasional. Dalam rangka menciptakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memperhatikan beberapa faktor dominan penentu iklim usaha (Lestari dan

Hidayat, 2014). Menurut Kementerian Perindustrian faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Infrastruktur
- b. Kepastian berusaha
- c. Pelayanan Birokrasi
- d. Kualitas SDM dan Tenaga Kerja
- e. Fasilitas Fiskal

Dari berbagai faktor-faktor tersebut pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga yang telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan kebijakan pendukung iklim usaha nasional dikategorikan dalam empat kelompok kebijakan yaitu :

- 1) Kebijakan Intensif Fiskal
 - a. Perpajakan
 - (1) *Tax holiday*
 - (2) *Tax allowance*
 - (3) Bea masuk penanaman modal
 - b. Kepabeanan
 - (1) Bea masuk ditanggung pemerintah
 - (2) Kemudahan impor tujuan ekspor
 - c. Dukungan penerapan teknologi industri
 - (1) Kredit dan keringanan suku bunga
- 2) Kebijakan Insentif non fiskal

- a. Pendaftaran izin investasi secara pelayanan terpadu satu pintu
 - b. Kemudahan izin keimigrasian bagi tenaga kerja asing
 - c. Fasilitas non fiskal kepabeanan
- 3) Kebijakan Insentif dan Kawasan

Kebijakan Insentif dalam Kawasan Seiring dengan rencana pengembangan iklim investasi, pemerintah juga secara bertahap dan terus menerus menata pengembangan industri dalam kawasan khusus. Penataan dalam kawasan terutama bertujuan untuk membangun sistem koordinasi antar sektor industri yang lebih efisien, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memperkuat sekaligus melindungi industri pelaku usaha industri didorong untuk melakukan kegiatan industri di dalam kawasan-kawasan khusus.

Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagai upaya untuk mengundang sebanyak mungkin investor dilakukan dua strategi dasar yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut, yakni pertama menjalankan kembali politik upah murah dan kedua menerapkan prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan (Lestari dan Hidayat, 2014).

Untuk menjamin pengembangan iklim usaha dan investasi, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan minimalisir berbagai hambatan

yang terjadi. Meskipun demikian, rendahnya kinerja investasi masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur perizinan yang terkait dengan investasi yang panjang, dimana prosedur perizinan untuk memulai usaha di Indonesia termasuk sangat lama
- b. Rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor.
- c. Belum menariknya insentif bagi kegiatan investasi, dimana jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk tertinggal di dalam menyusun insentif investasi.
- d. Rendahnya kualitas infrastruktur yang sebagian besar dalam keadaan rusak akibat krisis
- e. Iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif bagi berkembangnya investasi.
- f. Kurangnya jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan investasi atau usaha.

Sementara itu, peranan perdagangan dalam negeri menjadi begitu penting dalam mendorong kelancaran arus barang dan jasa melalui peningkatan efisiensi sistem distribusi nasional guna mendukung kelancaran barang ekspor. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan perdagangan dalam negeri sebagai berikut :

- a. Tingginya biaya ekonomi sehingga menurunkan daya saing ekspor
- b. Rendahnya penggunaan produk sendiri dalam negeri baik dikalangan industri atau konsumen
- c. Belum optimalnya pemanfaatan mekanisme bursa berjangka komoditi
- d. Rendahnya penerapan perlindungan konsumen
- e. Otonomi daerah yang menghambat kelancaran distribusi
- f. Rendahnya kualitas infrastruktur menyebabkan tingginya biaya ekspor
- g. Belum terintegrasinya sistem jaringan koleksi yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor.

Kebijakan pemerintah yang termasuk dalam kebijakan moneter longgar yang ditandai dengan tingkat bunga yang rendah dan penyaluran kredit tinggi, kebijakan fiskal yang kondusif seperti adanya *tax holiday*. Pada tingkat pajak yang rendah, biaya energi yang murah, kemudahan perizinan dan birokrasi berdampak positif bagi iklim investasi. Adapun sebaliknya apabila kebijakan pemerintah bersifat ketat, disektor moneter, fiskal dan sektor lainnya akan berdampak negatif pada iklim investasi (Lestari dan Hidayat, 2014).

Besarnya keuntungan perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya investasi yang dilakukan. Apabila keuntungan yang diperoleh besar maka akan mempengaruhi potensi untuk melakukan investasi meningkat dengan modal sendiri atau melalui lembaga keuangan lainnya.

Infrastruktur juga akan mempengaruhi faktor yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif seperti keadaan jalan baik, pelabuhan yang memadai, sumber energi yang tersedia, fasilitas transportasi yang memadai, telekomunikasi untuk meningkatkan kegiatan investasi.

4. Kestabilan Sosial dan Politik

Kondisi politik yang tidak stabil seperti seringnya pergantian menteri menyebabkan menurunnya daya Tarik investasi daerah. Ketidakstabilan merupakan unsur penting lain dalam iklim usaha. Ketidakstabilan politik mengakibatkan arah kebijakan pemerintah tidak jelas atau tidak ada kepastian hukum termasuk dibidang investasi. Dari sisi lain juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro seperti tingkat inflasi dan ketidakstabilan rupiah. Faktor sosial digunakan untuk melihat dan menjaga keamanan investasi, karena Kabupaten Sleman berada pada kota propinsi sehingga bermacam-macam suku bangsa, ras sehingga berpotensi kerusuhan yang bersifat etnis, agama, separatism, kecemburuan sosial, maka pelaku usaha akan teliti dalam mendirikan dan menanamkan modlanya di daerah tersebut. Kestabilan sosial dan politik merupakan unsur penting lain dalam pelaksanaan iklim usaha yang kondusif (Lestari dan Hidayat, 2014).

Penangan masalah sosial dan pemerataan adalah tugas pemerintah dan masyarakat sendiri. Pemerintah berperan dalam pemerataan untuk melaksanakan keadilan sosial. Pemerataan dan pendapatan yang ditimbulkan karena pasar bebas tidak adil dilakukan dalam level *playing*

flied (tempat bermain yang seimbang) dan tidak memihak pada kaum lemah. Dengan demikian keadilan bukan suatu hal yang statis dan absolut akan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relative tergantung pada persepsi pelaku usaha. Sebagai gambaran, ketidakpastian arah politik di Indonesia pada awal krisis politik pasca orde baru pada timbulnya ketidakstabilan ekonomi, dari pengalam krisis tersebut membuktikan kerapuran dalam sistem politik, sosial budaya, keamanan dan pemerintahan merupakan faktor yang dominan dalam mendorong proses ketidakpastian penegakan hukum merupakan faktor penyebab menurunnya *willingness* bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia (Haryotejo, B., 2012).

Lingkungan sosial budaya berkaitan dengan perkembangan nilai-nilai, kaidah dan persepsi masyarakat. Masyarakat desa dan kota memiliki lingkungan yang berbeda. Masyarakat desa biasa membentuk sistem kekerabatan, sedangkan masyarakat kota memiliki sistem kekerabatan keluarga inti.

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim investasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi

dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.

5. Birokrasi

Birokrasi terdiri dari kata biro yang artinya meja dan krasi adalah kekuasaan. Jadi birokrasi adalah peraturan atau kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan undang-undangan dan prinsip ideal bekerja suatu organisasi. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus-menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi tersebut merupakan serangkaian permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi baik pusat maupun di daerah-daerah. Khususnya bagi daerah, otonomi daerah yang semula diharapkan untuk lebih baik, justru pada kenyataannya tujuan belum mampu dijalankan dengan baik, yang terjadi kebijakan-kebijakan daerah di tengah jalan yang berakibat semakin jeleknya pelayanan publik.

Namun kadang, birokrasi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Sehingga jika masyarakat membicarakan birokrasi, maka akan berpikiran negative tentang birokrasi. Bahkan, birokrasi diidentikkan dengan korupsi, infisiensi, pelayanan yang berbelit-belit, rendahnya tingkat akuntabilitas, responsifitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Lestari dan Hidayat, 2014). Berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi tersebut merupakan serangkaian permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi baik pusat maupun di daerah-daerah. Khususnya bagi daerah, otonomi daerah yang semula diharapkan untuk lebih baik, justru pada kenyataannya tujuan belum mampu dijalankan dengan baik, yang terjadi kebijakan-kebijakan daerah di tengah jalan yang berakibat semakin jeleknya pelayanan publik. Ada faktor penghambat adminitrasi negara atau Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Campur tangan dari struktural terhadap kehidupan masyarakat
- b. Lemahnya kemampuan manajemne pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan
- c. Rendahnya produktifitas pegawai

5.1 Birokrasi dan Investasi

Besarnya biaya birokrasi formal yang harus dikeluarkan berinvestasi, maka investor cenderung menempuh jalur informal. Pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan yang baik, justru

bertindak sebagai penguasa. Kebijakan yang dikeluarkan sepertinya bukan mempermudah, melainkan mempersulit. Jika birokrasinya buruk, maka sangat berkolerasi dengan tingkat korupsi yang tinggi (Sukesi dan Ignatia, M,H, 2010).

Berdasarkan *Word Economic Database* pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan pada tahun 2013-2015. Selain itu kondisi berparah pada rendahnya proses kemudahan berusaha di Indonesia menurut *Easy of Doing Business 2016*. Indonesia menempati peringkat 109 dari 189 negara berarti Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara Asean. Pada kondisi ini strategi pertumbuhan tidak hanya mengandalkan intervensi kebijakan fiskal dan moneter. Menurut KPPOD kemudahan berusaha di Indonesia belum mampu dicapai daerah dari segi prosedur, waktu dan biaya. Kemudahan berusaha di daerah masih menemui hambatan seperti penambahan prosedur, inisiatif daerah yang tepat, dan keterlibatan instansi lain pada proses perizinan. Meskipun pemerintah menentukan pengurusan izin usaha bisa cepat dan mudah tapi dalam praktek lapangan sungguh berbeda.

5.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Investasi

Perekonomian daerah adalah proses dimana dapat menyebabkan peningkatan pendapatan riil perkapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai perbaikan dalam sistem kelembagaan. Peran pemerintah daerah dalam startegi pembangunan ekonomi daerah (Haryotejo,B., 2012) :

- a. Pemerintah daerah bertanggung jawab sebagai jalannya bisnis
- b. Peran koordinator dalam kebijakan dan peentapan strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat
- c. Sebagai fasilitator mempercepat pembangunan daerah melalui perbaikan lingkungan atau perilaku
- d. Sebagai peran stimulator yang memberikan rangsangan pengembangan usaha dan investasi.

Berdasarkan peranan diatas pemerintah daerah memiliki strategi dalam pembangunan ekonominya yaitu :

- a. Pengembangan kawasan industri atau kawasan investasi
- b. Strategi pengembangan dunia usaha melalui upaya kebijakan merangsang usaha dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) Memperbaiki kualitas lingkungan
 - 2) Pengembangan pusat informasi dan promosi
 - 3) Pengembangan usaha kecil
 - 4) Penelitian produk daerah

6. Infrastruktur

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum atau infrastruktur adalah merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membentuk kegiatan ekonomi dan masyarakat sehingga dapat berlangsung dengan menyediakan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Infrastruktur meliputi sarana dan prasarana milik pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

- a. Fasilitas transportasi, terdiri dari fasilitas jalan, jembatan, fasilitas transportasi darat, laut, udara yang disediakan pemerintah untuk memperlancar kegiatan distribusi barang dan manusia.
- b. Energi, terdiri dari listrik, BBM dan gas.
- c. Pos, telekomunikasi dan informatika.
- d. Sumber daya air dan air bersih.
- e. Perumahan dan pemukiman.
- f. Kesehatan terdiri dari kebersihan, pengelolaan lingkungan, limbah dan sebagainya.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

6.1 Infrastruktur dan Investasi

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana

fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yang rendah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya banyak perusahaan akan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya. Karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta (Haryotejo,B., 2012) maka dari itu Insfrastruktur dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

Dalam makro ekonomi transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan di mana kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan. Padahal transportasi merupakan alat untuk memindahkan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan .Transportasi juga banyak disebutkan sebagai sarana vital dalam infrastruktur. Untuk di Indonesia, secara keseluruhan terlihat peran infrastruktur transportasi dalam pertumbuhan ekonomi. Trasnportasi termasuk ke dalam salah satu

faktor yang mempengaruhi iklim investasi selain stabilitas politik dan sosial, stabilitas ekonomi yang tergolong ke dalam infrastruktur dasar yang meliputi listrik, telekomunikasi, sarana dan prasarana jalan, serta pelabuhan, sehingga menjadi permasalahan yang berarti untuk terbentuknya iklim usaha suatu daerah (Lestari dan Hidayat, 2014).

7. Sistem Keuangan

Suatu sistem keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank sudah berkembang dan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat *forward looking*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian. Memicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam dan sulit mengatasi kestabilan tersebut.

Penumbuhan iklim usaha maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang meliputi pendanaan, sarana dan prasaran, informasi usaha,

kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Untuk menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan sebagai berikut :

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi pelaku usaha untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memluas jaringan sehingga dapat diakses pelaku usaha industri kecil
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan.
- d. Membantu pelaku usaha industri untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik sistem konvensional maupun syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan investor untuk menanamkan modal di luar negeri terdiri dari faktor positif dan negatif. Faktor positif adalah kondisi yang keberadaannya menjadi syarat sebagai pertimbangan investor untuk memilih lokasi untuk menanamkan modal, yaitu meliputi adanya potensi yang menguntungkan, pasar yang besar dan berpotensi, ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang ahli dan murah, serta country image.

Adapun fungsi pokok dalam sistem keuangan memiliki fungsi sebagai fungsi tabungan, kekayaan, likuiditas, kredit, pembayaran, risiko, serta fungsi

kebijakan. Sehingga ciri utama dari sistem keuangan diantaranya kepercayaan, memiliki kemampuan intermediasi, dan efisiensi. Dengan demikian produk keuangan dalam sistem keuangan harus mampu memberikan rasa aman, efisiensi dan menguntungkan termasuk kondisi industri keuangan stabil (Haryotejo,B.,2012)

Hasil Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1.
Penelitian Terdahulu

| No | Judul dan penulis | Variabel | Metode penelitian | Hasil penelitian | Perbedaan peniliti |
|-----------|---|--|---|---|---|
| 1 | Analisis persepsi pengusaha terhadap iklim usaha di Kota Medan (Lestari dan Hidayat, 2014) | Karakteristik Individu dan Faktor yang mempengaruhi Iklim Usaha : Kebijakan Pemerintah, Kestabilan Politik dan Sosial, Birokrasi dan Infrastruktur | Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode skala Likerts | Iklim Usaha di Kota Medan kondusif menurut perspektif pengusaha. Faktor penentu terciptanya iklim usaha yang kondusif menurut pengusaha adalah kestabilan politik dan sosial dan diikuti faktor birokrasi. Menurut pengusaha kestabilan politik dan sosial sangat dominan dalam mempengaruhi persepsi pengusaha untuk membuka usaha | Peneliti menambahkan variabel sistem keuangan pada penelitian yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi iklim usaha yang termasuk dalam akses pembiayaan |
| 2 | Upaya Peningkatan Iklim Investasi terhadap peluang kerjasama investor antara daerah. (Sukei dan Ignatia Martha, 2010) | Analisis potensi dan pengembangan investasi dan komoditi unggulan, analisis prosedur dan perizinan, analisis terhadap manjamene investasi, teknologi produksi dan peluang kerjasama antar daerah dalam investasi | Jenis data primer dan data sekunder dengan metode analisis statistik deskriptif dan tabulasi. | Hasilnya iklim investasi di kabupaten Nganjuk belum kondusif yang dapat dilihat dari indikator biaya perizinan kurang transparan, proses perizinan terlalu lama, infrastruktur kurang mendukung, keamanan beriventasi kurang terjamin, sarana investasi masih minim dan kelembagaan belum kondusif. | Dalam penelitian berikutnya penulis menambahkan variabel tentang kebijakan pemerintah, kestabilan sosial dan politik serta birokrasi. |

Tabel Lanjutan 2.1.
 Penelitian Terdahulu

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 3 | Analisis Iklim Investasi Daerah . (Haryotejo, B., 2012) | Indikatornya pada iklim investasi untuk melihat kepentingan dari skala keamanan kondisi lingkungan bisnis, layanan infrastruktur publik, hukum tenaga kerja, dan akses pembiayaan | Penelitian ini dilakukan dengan metode survei pada aspek bisnis (mikro daerah Semarang. Analisis kualitatif dengan mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarin ya. | Hasil penilaian iklim investasi di semarang menunjukkan bahwa semarang telah dihargai 3,058 dan dikategorikan sebagai cukup kondusif. Dari tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar adalah keamanan kondisi diikuti pelayanan infrastruktur dan akses pembiayaan. | Peneliti menambahkan variabel kestabilan sosial dan politik, birokrasi serta kebijakan pemerintah dan mengganti akses pembiayaan dengan sistem keuangan agar penelitian berbeda. |
| 4 | Pengembangan Iklim Investasi Daerah (Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir, 2012) | Variabel pada penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi | Metode analisis kualitatif dengan mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarin ya. | Iklim investasi yang kondusif perlu didorong oleh sektor investasi dan ekspor sehingga seseorang dapat melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. | Perbedaan dengan penelitian berikutnya penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana didukung oleh data kuantitatif persepsi pelaku usaha. |

Tabel Lanjutan 2.1.
 Penelitian Terdahulu

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 5 | The impact of higher quality government regulation of business and greater economic freedom on living standards Evidence from OECD nations (Richard Cebula, 2016) | Kualitas regulasi, kebebasan ekonomi, peluang kewirausahaan, infrastruktur dan pajak | Metode analisis menggunakan data panel | Kebebasan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kewirausahaan selain itu persentase pertumbuhan pendapatan riil yang diperlukan untuk jangka panjang peningkatan infrastruktur. | Metode penelitian yang berbeda karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sedangkan penulis sekarang menggunakan data primer untuk analisis baru tentang dampak regulasi terhadap kualitas bisnis. |
| 6 | Ease of doing business and FDI inflow to Sub-Saharan Africa and Asian countries (Rosetta Moris dan Abdul Aziz, 2011) | Variabel independen mencakup 10 faktor tentang kemudahan melakukan bisnis dan dependen variabel faktor-faktor FDI | Metode analisis menggunakan koefisien korelasi dari sampel yang digunakan melalui hasil survei | Hubungan positif antara keseluruhan indeks kemudahan berbisnis dan FDI ditemukan sampel gabungan selama tahun 2000-2001, temuan penting dalam penelitian ini perbedaan yang signifikan antara negara SSA dan negara Asia dalam kemudahan berbisnis sehingga Asia menerima proporsi FDI yang lebih besar maka dari temuan ini negara SSA harus memperbaiki iklim usaha dalam kemudahan berbisnis yang didefinisikan oleh Bank Dunia. | Variabel yang dipilih oleh penulis meliputi dari faktor-faktor yang mempengaruhi iklim usaha bukan faktor-faktor dalam kemudahan berusaha. |

Tabel Lanjutan 2.1.
Penelitian Terdahulu

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| 7 | Key factors influencing foreign direct investment in the tourism industry in South Africa (Snyman, J.A and Saayman, M, 2009) | Faktor persepsi, infrastruktur, pemerintah dan kebijakan, ekonomi, daya saing dan alam. | Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan progam bantuan SPSS 15.0 dengan hasil survei dilakukan dengan cara kuisisioner | Ada hubungan anantara perilaku perjalanan dan investasi jadi turis atau calon investor ada kesempatan investasi yang lebih besar, iklim merupakan motivator utama bagi investor untuk berinvestasi di Afrika, faktor yang paling penting adalah agar industri pariwisata tetap ada kompetitif dan diikuti dukungan pemerintah akan kebijakan yang jelas. | Dalam penelitian saya menggunakan variabel tambahan sistem ekonomi, birokrasi dan kestabilan sosial & politik sehingga menentukan faktor yang paling dominan. |
| 8 | Developing effective local content regulations in sub-Saharan Africa: The need for more effective policy alignment (Brown, D.T, 2016) | Adapun variabel tentang kebijakan publik, investasi asing, konten lokal dan mencakup Sub Sahara Afrika | Pendekatan ini melibatkan tinjauan literatur dan rincian operasional dan keterbatasan lokal hukum konten di sub-Saharan Afrika. | Sub Sahara Afrika tidak hanya memperhatikan jumlah pajak yang dibayarkan pemerintah, tetapi mempertimbangkan aktivitas ekonomi untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja lokal dan mengembangkan perusahaan melalui progam, kebijakan pemerintahan mengadopsi kebijakan insentif investasi untuk menarik investasi asing dan l, mengubungkan insentif investasi dengan kebijakan | Penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi iklim usaha sehingga faktor infrastuktur, kestabilan sosial politik, sistem keuangan dan birokrasi tidak hanya kebijakan pemerintah saja untuk mengetahui terciptanya iklim investasi suatu daerah. |

Tabel Lanjutan 2.1.
Penelitian Terdahulu

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| | | | | konten lokal peraturan berpotensi mendukung dan memperkuat pengembangan industri. | |
| 9 | Survei Daya Saing Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Upaya Peningkatan Kerja Investasi (Ekopriyono, 2017) | Indikator penilaian didasarkan pada 6 sub-indeks yaitu Kinerja ekonomi, persepsi iklim bisnis, kinerja investasi, kinerja pemerintah, dinamika bisnis, dan kapasitas infrastruktur. | Metode proporsional. Hasil data diolah menggunakan software khusus untuk menghitung indeks dan sub indeks dengan skala satu sampai sepuluh | Infrastruktur, kinerja investasi, iklim bisnis, kinerja ekonomi mengalami peningkatan. Sedangkan dinamika usaha, kinerja pemerintah mengalami penurunan disbanding dengan survei daya saing tahun 2010. Lima besar daya saing daerah tahun 2013 yaitu Pekalongan, Magelang, Banyumas, Sragen, Wonosobo. | Perbedaan dengan peneliti selanjutnya pada tujuan penelitian karena pada penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor penentu iklim usaha disuatu daerah. |
| 10 | Analisis Faktor Pendukung Investasi untuk Peningkatan gairah Investasi di Kota Semarang (Hardiwinoto, dkk, 2015) | Variabel penelitian ini adalah peran kelembagaan, zonasi kota, infrastruktur | Metode yang digunakan survei dari pengusaha dan alat analisis yang digunakan yaitu regresi | Hasil penelitian ini diketahui semua variabel pendukung investasi di Kota Semarang berpengaruh positif terhadap gairah investasi, tapi zona kota tidak mempengaruhi secara signifikan. Hasil hitung diketahui bahwa variabel infrastruktur yang paling berpengaruh terhadap gairah investasi | Pada metode analisis dan tujuan penelitian berbeda dengan penelitian selanjutnya karena penelitian selanjutnya menggunakan tambahan variabel |

Pada penelitian Lestari dan Hidayat, (2014) diketahui bahwa iklim usaha di Kota Medan Kondusif menurut persepektif pengusaha. Faktor penentu terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kota Medan yaitu kestabilan politik dan sosial, menurut pengusaha kestabilan politik dan sosial sangat dominan dalam mempengaruhi persepsi untuk membuka usaha. Birokrasi di Kota Medan masih terdapat oknum-oknum yang nakal, Infrastruktur masih ada yang perlu diperbaiki dan kebijakan pemerintah Kota Medan mendukung dunia usaha dengan sistem perizinan satu atap dan kawasan industri.

Penelitian Sukei dan Ignatia M.H, (2010) diketahui iklim investasi di Kabupaten Nganjuk belum kondusif karena masih ada faktor penghambat seperti biaya perizinan tidak transparan, proses perizinan lama, infrastruktur belum mendukung, keamanan kurang terjamin, sarana dalam mendukung investasi masih minim dan kelembagaan belum kondusif. Berdasarkan kemampuan untuk menyerap tenaga kerja pada sektor pertanian dan industri kecil.

Penelitian Haryotejo,B., (2012) diketahui Daerah Semarang memiliki kondisi keamanan yang baik dalam melaksanakan kegiatan usaha komersial dengan indikator kondisi keamanan mendapatkan nilai 3,441 menduduki tempat teratas dibandingkan dengan indikator lainnya. Seluruh indikator lainnya dalam kondisi sedang dengan indikator perpajakan pada posisi terbawah dengan nilai 2,631 yang masih membuka peluang perbaikan untuk mendorong investasi.

Penelitian Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir (2012) diketahui bahwa dinamika perkembangan ekonomi domestik di dorong oleh investasi dan

ekspor. Maka diperlukan iklim investasi yang kondusif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi pada penelitian ini adalah stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur, sektor pembiayaan, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsistensi dan kebijakan.

Penelitian Richard Cebula F.R, (2016) menginvestigasi dampak regulasi publik perusahaan yang lebih berkualitas dan bisnis sektor swasta. Kebebasan ekonomi yang lebih besar pada tingkat pertumbuhan dalam standar hidup di negara selama penelitian memberikan dukungan yang konsisten untuk dua hipotesis, bahwa semakin besar peningkatan kualitas pengaturan semakin tinggi tingkat pertumbuhan standar hidup. Persentase perkiraan pertumbuhan pendapatan riil yang diperlukan untuk jangka panjang yaitu peningkatan infrastruktur.

Penelitian Rosetta Moris dan Abdul Aziz, (2011) diketahui dalam hal indeks keseluruhan kemudahan melakukan bisnis dan beberapa faktor yang mencakup memulai bisnis, mempekerjakan pekerja, mendaftarkan property, membayar pajak dan perdagangan lintas batas. Dalam semua kasus peringkat SSA lebih rendah daripada peringkat negara-negara Asia. Penelitian ini memberikan dukungan parsial untuk hipotesis bahwa FDI terkait dengan iklim usaha sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia.

Penelitian Snyman, J.A and Saayman, M, (2009) diketahui untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi FDI untuk industri agar berhasil bersaing secara global dalam menarik investor asing dari penelitian tersebut dalam pemasar pariwisata harus menggunakan informasi dalam upaya merancang

kebijakan yang menghasilkan peningkatan FDI ke Afrika sekarang perlu didasarkan pemahaman tentang apa awalnya memotivasi investor agar melakukan investasi maka determinasi investasi pariwisata perlu dilakukan.

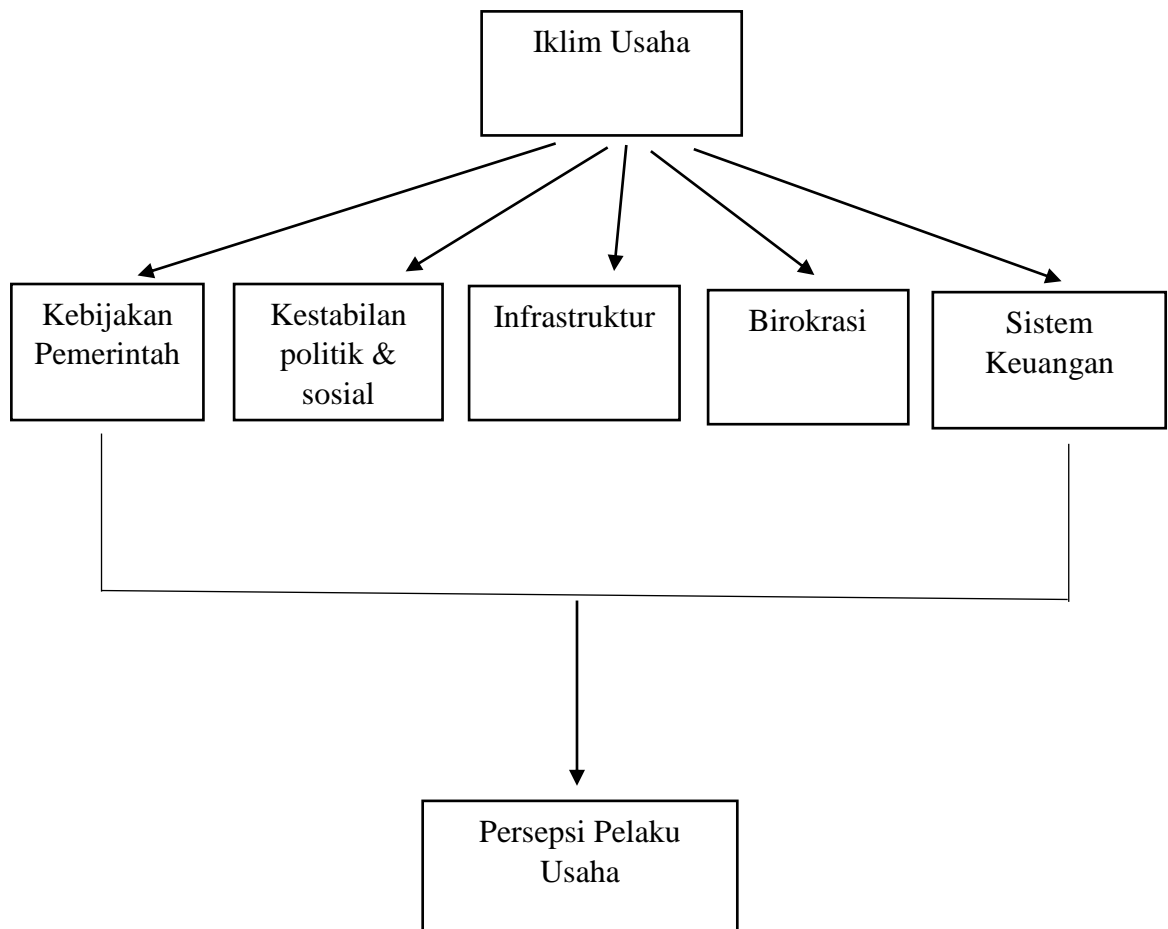
Penelitian Brown,D.T., (2016) menunjukkan bahwa tertanamnya modal manusia dan praktik pengembangan kemampuan perusahaan domestic dalam kerangka kebijakan lokal adalah dua instrument kebijakan penting. Sub-Sahara Afrika tidak hanya perlu memperhatikan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tetapi harus mempertimbangkan kegiatan ekonomi. Menghubungkan insentif investasi dengan kebijakan konten lokal peraturan pada titik kritis berpotensi mendukung dan memperkuat pengembangan industri di Sub Sahara Afrika.

Penelitian Ekopriyono, A (2017) diketahui tantangan utama di Jawa Tengah adalah meningkatkan kinerja investasi, perbaikan infrastruktur dan kinerja pemerintah. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kendala dalam pembangunan daerah adalah lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Adapun lima peringkat Kabupaten dalam survei SDSD 2013 yaitu Pekalongan, Magelang, Banyumas, Sragen dan Wonosobo.

Penelitian Hardiwinoto, dkk (2015) diketahui hasil nilai koefisien determinasi sebesar 0,868 atau 86,8% itu tandanya gairah investasi pada penelitian dipengaruhi oleh kelembagaan, tata ruang dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa (100% - 86,8%) yaitu 13,2 % dipengaruhi oleh variabel lain.

C. Model penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Model Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim usaha pada penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah, kestabilan politik & sosial, infrastruktur, birokrasi dan sistem keuangan yang akan memunculkan persepsi pelaku usaha terhadap iklim usaha di Kabupaten Sleman.